



ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG

Siti Hasna Zahra Hakimah, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone + 622476486851

ABSTRACT

This study aims to determine whether the General Allocation Fund (DAU), Regional Original Income (PAD) affects the Regional Expenditure of Semarang City. The method of analysis used is quantitative method, with multiple regression testing by doing the classical assumption test before getting the best research model. The variables in this study are General Allocation Fund (DAU), Regional Original Revenue (PAD) as independent variables, while the dependent variable is Regional Expenditure.

The population used in this study is the Semarang City Regional Revenue and Expenditure Realization Report 2016 - 2022. The object of this research is the General Allocation Fund (DAU), Regional Original Income (PAD) and Regional Expenditure (BD). The sample used is the Semarang City Regional Revenue and Expenditure Realization Report 2016-2022. The data analyzed in this study are time series data sourced from the Central Bureau of Statistics and the Semarang City Financial and Asset Management Agency.

The results of this study prove that the General Allocation Fund has no significant effect on regional expenditure in Semarang City, Regional Original Revenue has a significant effect and has a positive influence on regional expenditure in Semarang City.

Keywords: General Allocation Fund (DAU), Regional Original Revenue (PAD), Regional Expenditure, Regional Revenue and Expenditure Realization Report.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah tidak lagi hanya menjadi slogan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang harus dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan di setiap daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan berbagai harapannya harus diupayakan dengan kerja keras agar semua keinginan tersebut bisa segera terwujud. Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah harus ditingkatkan dengan memperhatikan hubungan antara berbagai tingkatan pemerintahan dan pemerintahan daerah, serta mempertimbangkan potensi dan keragaman daerah, dan peluang serta tantangan dari persaingan global. Upaya ini dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah, bersama dengan hak dan kewajiban untuk menjalankan otonomi daerah sesuai dengan sistem pemerintahan negara yang diatur dalam (UU No. 32 Tahun 2004).

Menurut Jaya (2002), pelaksanaan otonomi daerah telah membawa dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas daerah. Penerapan desentralisasi dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Situasi ini akan semakin memperkuat tekanan internal terhadap keuangan daerah, karena peran dana dan bantuan dari pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah akan semakin berkurang. Bantuan dari pusat dalam pembiayaan pembangunan hanya akan diberikan untuk mendukung pengeluaran pemerintah, terutama untuk belanja pegawai dan program-program pembangunan yang ingin dicapai.

¹ Corresponding author



Pengelolaan keuangan daerah berhubungan erat dengan pelaksanaan desentralisasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui desentralisasi, beberapa fungsi pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengutamakan kebijakan otonomi daerah, adalah salah satu bentuk kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik. Menurut Suparmoko (2002), dengan mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibandingkan jika ditangani secara terpusat. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan dana yang cukup besar, sehingga daerah diharapkan mampu menggali berbagai sumber keuangan yang ada.

Menurut Suparmoko (2011), keuangan daerah bersumber dari enam sumber utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), Pinjaman Daerah, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan sumber lainnya dikelola oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah. Jadi, dana untuk pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pendapatan lainnya yang sah. Biasanya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah suatu daerah lebih banyak berasal dari bantuan pemerintah pusat dan sumber-sumber lain yang diatur oleh hukum. Akibatnya, daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah (PAD) dianggap sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk menilai kemampuan suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin besar kemampuan daerah tersebut dalam mengelola pembangunan secara mandiri dan semakin kecil ketergantungannya pada pemerintah pusat. Tingginya perolehan PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber penerimaan daerah, dan juga menunjukkan semakin baiknya kemandirian keuangan daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, semakin mampu daerah tersebut memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Menurut Mahmudi (2010), Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan untuk menciptakan pemerataan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari setiap daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004.

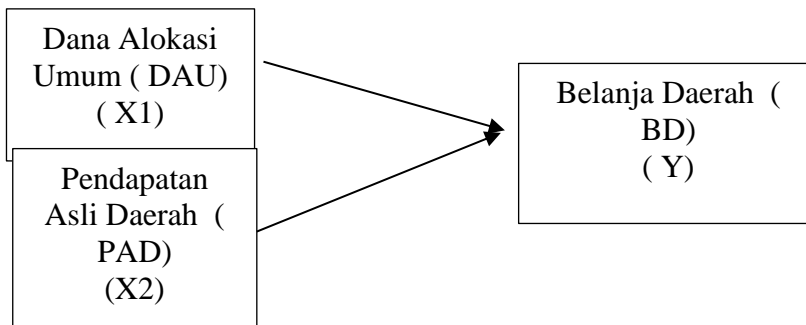
Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Menurut Warsito, dkk (2008), belanja daerah dirinci berdasarkan urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota, yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya di bidang tertentu bisa dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja untuk penyelenggaraan urusan wajib diutamakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan melalui peningkatan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Untuk memudahkan penilaian terhadap kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja daerah dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja daerah merupakan komponen penting yang selalu menarik perhatian publik. Hal ini karena masyarakat, sebagai penyumbang dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan, memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan secara tepat, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah ini juga mencerminkan kebijakan pemerintah dan arah pembangunan daerah, menurut Mahmudi (2010).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Pada penelitian ini, menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan

variabel independen. Pengembangan kerangka pemikiran untuk penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Tax Spend Hypothesis adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa pendapatan daerah, terutama yang berasal dari pajak dan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya, memiliki pengaruh langsung terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Teori ini menekankan bahwa perubahan dalam penerimaan atau pendapatan daerah akan mempengaruhi perubahan dalam anggaran belanja daerah. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan cenderung diikuti oleh peningkatan pengeluaran, dan sebaliknya.

Tax Spend Hypothesis menegaskan bahwa perubahan dalam pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari pajak dan pendapatan asli daerah lainnya, akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah. Studi yang dilakukan oleh Aziz et al. (2000) dan Doi (1998) mendukung hipotesis ini, menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan cenderung diikuti oleh peningkatan pengeluaran. Hal ini penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola anggaran mereka, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Literatur ekonomi dan keuangan daerah telah mendiskusikan hubungan antara pendapatan dan belanja daerah secara luas sejak akhir dekade 1950-an. Berbagai hipotesis dan studi empiris telah dilakukan untuk menguji arah kausalitas antara pendapatan dan belanja daerah.

Menurut beberapa studi, pendapatan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Teori ini mendukung hipotesis bahwa peningkatan pendapatan akan diikuti oleh peningkatan belanja. Aziz (2000) dan Doi (1998) menemukan bahwa perubahan pendapatan, terutama dari pajak daerah, akan mempengaruhi perubahan dalam anggaran belanja daerah. Hipotesis ini menyatakan bahwa pendapatan daerah, terutama yang berasal dari pajak, akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah. Dengan kata lain, perubahan dalam penerimaan daerah akan menyebabkan perubahan dalam pengeluaran daerah. Sebaliknya, beberapa studi menyatakan bahwa belanja daerah dapat mempengaruhi pendapatan. Hipotesis ini berpendapat bahwa peningkatan belanja daerah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak.

Hubungan antara pendapatan dan belanja daerah adalah kompleks dan telah menjadi subjek penelitian yang luas selama beberapa dekade. Studi menunjukkan bahwa pendapatan, baik dari sumber lokal maupun transfer dari pemerintah pusat, memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran daerah. Efek dari transfer seringkali lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari pajak daerah, menunjukkan bahwa transfer dana dapat memiliki implikasi penting bagi pengelolaan anggaran dan kebijakan fiskal di tingkat daerah. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai faktor ini dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan mereka untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih besar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan dua jenis variabel utama: variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Berikut penjelasan mengenai kedua jenis variabel tersebut:

1. Variabel Bebas (Independent Variable) : Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Variabel Terikat (Dependent Variable) : Belanja Daerah

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang selama periode tahun 2016 – 2022. Objek penelitian ini adalah data dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang mencakup DAU, PAD, dan BD dari tahun 2016 - 2022. Data ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana DAU dan PAD mempengaruhi BD di Kota Semarang.

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2022. Pemilihan sampel ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.

Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder dengan jenis data time series berupa Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2016 – 2022 yang berupa realisasi Belanja Daerah (BD), realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	7	87398229538	1317186595000	1047696371457.00	426619892753.260
PAD	7	1491645900065	2545991747658	2018230587859.86	361343374944.990
BD	7	3931802540351	4871946697040	4452284621066.57	341545907244.983
Valid N (listwise)	7				

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengumpulan dan seleksi data penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 dapat diinterpretasikan bahwa variabel DAU dari pengamatan sebanyak 7 data memiliki nilai minimum sebesar Rp 87.398.229.538 dengan nilai maksimum sebesar Rp 1.317.186.595.000. nilai rata – rata DAU sebesar Rp 1.047.696.371.457,00 dengan standar deviasi Rp 426.619.892.753,260, standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai rata – rata sehingga menunjukkan bahwa distribusi data normal.

Hasil pengujian variabel PAD dari pengamatan sebanyak 7 data menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai minimum Rp 1.491.645.900.065 dengan nilai maksimum Rp 2.545.991.747.658. Nilai rata – rata PAD sebesar Rp 2.018.230.587.859,86 dengan standar deviasi Rp 361.343.374.944,990, standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai rata – rata sehingga menunjukkan bahwa distribusi data normal.

Hasil pengujian variabel BD dari pengamatan sebanyak 7 data menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai minimum Rp 3.931.802.540.351 dengan nilai maksimum Rp 4.871.946.697.040. Nilai rata – rata BD sebesar Rp 4.452.284.621.066,57 dengan standar deviasi Rp 341.545.907.244,983,



standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai rata – rata sehingga menunjukkan bahwa distribusi data normal.

Uji Normalitas

Tests of Normality			
	Kolmogorov-Sminov		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.194	7	.200
a. Liliefors Significance Correction			

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh nilai signifikansi dari uji kolmogrov- sminov (KS) sebesar 0,200 lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian yaitu 0.05 berarti data yang digunakan terdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1.	(Constant)		
	DAU	.783	1.276
	PAD	.783	1.276
a. Dependent Variable: BD			

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

semua varibel independen memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan *VIF* ≤ 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1.	(Constant)	.368	.732
	DAU	.642	.556
	PAD	-.373	.728
a. Dependent Variable: ABRESID			

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

Semua variabel independen pada tabel 4.4 memiliki nilai signifikansi >0.05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian data tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi



Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	16803457145.16504
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	4
Total Cases	7
Number of Runs	5
Z	.061
Asymp. Sig. (2-tailed)	.952
a. Median	

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

Hasil pengujian autokorelasi dengan uji Run Test di peroleh sebesar 0,952 > 5% artinya tidak terdapat auto korelasi pada model regresi.

Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.965 ^a	.931	.897	97188138817.71458
a. Predictors: (Constant), PAD, DAU				

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

Nilai koefisien determinasi sebesar 0.931 hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 93,1% sedangkan sisanya 6,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	513343184695750300000000.000	2	256671592347875140000000.000	27.174	.005 ^b
	Residual	37782137307405440000000.000	4	9445534326851360000000.000		
	Total	551125322003155700000000.000	6			
a. Dependent Variable: BD						



b. Predictors: (Constant), PAD, DAU

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

Nilai F sebesar 27.174 > sig dan nilai sig sebesar 0,005 < 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen belanja daerah.

Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	281090433137	319074397799		8.810	.001
		9.240	.219			
	DAU	.004	.105	.005	.034	.975
	PAD	.811	.124	.967	6.541	.003

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

Variabel DAU diperoleh nilai t sebesar 0,034 dengan nilai signifikan 0,975 > 0.05 sehingga dapat dibuktikan bahwa variabel DAU tidak mempengaruhi atau menolak hipotesis yang diajukan, sedangkan pada variabel PAD diperoleh nilai t sebesar 6,541 dengan nilai signifikan 0.003 < 0.05 dapat dibuktikan bahwa variabel PAD signifikan mempengaruhi variabel Belanja daerah atau menerima hipotesis yang diajukan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan dari hasil analisis data terdapat kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian Dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Kota Semarang. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kota Semarang tidak bergantung pada dana transfer dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat yang mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi.
2. Berdasarkan hasil penelitian pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah pada Kota Semarang. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kota Semarang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerah juga akan semakin tinggi.

Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini terdapat keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian berikutnya. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data terkait dari laporan realisasi pendapatan pemerintah Kota Semarang baru sebatas dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Objek penelitian terbatas, hanya wilayah Kota Semarang.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah mampu untuk meningkatkan dan menggali sumber – sumber pendapatan asli daerah (PAD) baik secara intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Semarang.

2. Pemerintah daerah agar bisa terus mengupayakan untuk menarik dana alokasi umum dialokasikan pada sektor publik agar penggunaan dana tersebut menjadi lebih efisien. Pemerintah daerah juga harus objektif dan selektif dalam pelaksanaan belanja daerah agar sesuai apa yang diharapkan masyarakat.

REFERENSI

- (Handayani & Saifudin, 2019; Kolinug et al., n.d.; Melda & Syofyan, 2020; Ridho & Wijayanti, 2022; Sianturi, 2021; et al., 2021) Handayani, S., & Saifudin, S. (2019). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2015-2016. *Solusi*, 16(4), 79–106. <https://doi.org/10.26623/slsi.v16i4.1669>
- Kolinug, F. C., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (n.d.). *Analisis Dau Dan Belanja Medan*.
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2826–2838. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.252>
- Ridho, M. A. M., & Wijayanti, D. (2022). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 71–81. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art7>
- Sianturi, E. (2021). Analisis Pengaruh Dana alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah. *Juripol*, 4(1), 98–106. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10985>
- Yuliani, Y., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal*. 693–701. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5224>
- Jaya WK, 2002, *Analisa Keuangan Daerah : Pendekatan Makro, Model Program PMSS ES, Kerjasama Dit jen PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis UGM*.
- Suparmoko., 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang No.33 Tahun 2004
- Maimunah. (2006). *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Padang, Indonesia.
- Oates, Wallace. 1999. *an essay of fiscal federalism*. *Journal of Economics Literature* 37:1120-1149.
- Mahmudi., 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Purnomo, Bayu, 2011 *Flypaper Effect* pada Pengaruh transfer tidak bersyarat dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tahun 2007-2010. Rosen, H.S., 2002, *Publik Finance*, edisi keenam, MC-Graw Hill Book.co., New York.
- Handayani Atiah. 2009. *Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.



- Jaya WK, 2002, Analisa Keuangan Daerah: Pendekatan Makro, Model Program PMSS ES, Kerjasama ditjen PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis UGM
- Warsito, Kawedar, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit UNDIP: Semarang
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Kerlinger, F. N. (1992). *Foundations of Behavioral Research*. 3rd Edition. Fort Worth, TX: Harcourt Brace.